

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Hambatan paradiplomasi Victoria dengan China dalam kerja sama BRI muncul berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Federal Australia dalam urusan luar negeri. Sejak awal federasi, urusan luar negeri dipersepsikan sebagai domain pemerintah pusat meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Pasal 51(xxix) memberi wewenang bagi pemerintah federal untuk membuat undang-undang domestik sebagai implementasi perjanjian internasional karena Australia tidak menganut prinsip *self-executing treaties*. Namun, perluasan kewenangan ini tidak diikuti dengan dasar hukum yang jelas maupun konsultasi dengan negara bagian, sehingga menimbulkan defisit demokrasi dan ketegangan dalam hubungan federal-negara bagian. Dalam konteks ini, sikap paralel-disharmoni terlihat jelas melalui sikap pemerintah federal yang cukup berhati-hati terhadap BRI, sedangkan Victoria menyambut kerja sama BRI sebagai peluang ekonomi untuk memperkuat pembangunan daerah.

Penelitian ini menjabarkan peran pemerintah daerah yaitu Daniel Andrews cukup signifikan dalam mendorong paradiplomasi Victoria, terutama karena alasan penguatan potensi wilayah yang melampaui batas wilayahnya secara tradisional. Hasil paradiplomasi ini adalah ketidakselarasan dengan persepsi pemerintah pusat sehingga menunjukkan bahwa hubungan internasional di tingkat subnasional tidak terlepas dari dinamika kekuasaan pusat-daerah yang berjalan diantara batas konstitusional yang kabur. Sebelum 2020, ketiadaan regulasi yang mengatur peran negara bagian membuat aktivitas seperti BRI bersifat ambigu. Pemberlakuan *Australia's Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Act 2020* menandai pergeseran menuju sentralisasi, menjadi instrumen hukum sekaligus pernyataan politik yang menegaskan kembali kontrol pemerintah federal terhadap hubungan luar negeri. Studi kasus ini menunjukkan bahwa meskipun negara bagian memiliki motif ekonomi dan aspirasi internasional yang kuat, keberhasilan paradiplomasi di Australia bergantung pada kejelasan hukum dan koordinasi yang

harmonis antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan di ranah internasional.

Penelitian ini juga menggunakan konteks analisis Michelmann & Soldatos untuk menjelaskan bentuk rasionalisasi yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Australia merupakan gambaran proses sentralisasi bagi negara-negara bagian dalam penyelenggaraan urusan luar negeri. Hal ini dilakukan oleh penulis karena Kuznetsov menyediakan bentuk rasionalisasi sebagai salah satu konteks positif dalam konsekuensi kebijakan luar negeri pemerintah pusat, sedangkan dalam perspektif subnasional, Michelmann dan Soldatos menekankan bahwa rasionalisasi cenderung mendorong sentralisasi dan pengurangan keleluasaan negara bagian dalam urusan luar negeri untuk mendorong kepentingan wilayahnya.

#### 4.2 Saran

Penelitian ini membahas mengenai hambatan yang dihadapi oleh Victoria melalui enam poin pertanyaan yang dimuat dalam teori paradiplomasi milik Kuznetsov. Keterbatasan dalam ruang lingkup analisis yang berfokus pada satu studi kasus, yakni kerja sama BRI antara Victoria dan China. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan kajian dengan melakukan perbandingan antarnegara bagian di Australia guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola dan dinamika paradiplomasi dalam sistem federal. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam peran aktor non-pemerintah seperti sektor swasta, akademisi, dan lembaga Masyarakat dalam mendorong agenda internasional negara bagian. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda dengan tujuan pendalaman data yang digunakan, yaitu melalui studi wacana media, atau wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan di tingkat federal maupun negara bagian. Pendekatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih empiris mengenai proses negosiasi, koordinasi, dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan luar negeri. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai paradiplomasi dan memberikan kontribusi terhadap perumusan model hubungan pusat-daerah yang lebih adaptif terhadap dinamika politik internasional kontemporer.